

GERBANG PELANA SEBAGAI INSTRUMEN MEMBANGUN PESISIR LAMPUNG

1. LATAR BELAKANG

Provinsi Lampung merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak ke-2 di Pulau Sumatera setelah Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan data BPS tahun 2016, jumlah penduduk Provinsi Lampung tercatat lebih dari 8,2 juta jiwa, bahkan jika berdasarkan data registrasi penduduk, jumlahnya telah mencapai 9,5 juta jiwa. Provinsi Lampung yang memiliki garis pantai sepanjang 1105 kilometer yang merupakan terpanjang kedua di Pulau Sumatera setelah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, juga mempunyai potensi sumberdaya alam yang luar biasa, antara lain: perikanan, ekosistem pesisir dan laut (mangrove, lamun, terumbu karang dan pulau-pulau kecil), rumput laut dan pariwisata, serta potensi kelautan lainnya.

Namun demikian, kondisi wilayah pesisir Provinsi Lampung masih cukup memprihatinkan diantaranya pemenuhan infrastruktur dasar yang masih minim, kegiatan perekonomian masyarakat yang belum berkembang serta kehidupan masyarakat yang belum berdaya. Dari kondisi tersebut, sebagai salah satu lokomotif pembangunan ekonomi, pembangunan wilayah pesisir Lampung tentunya harus diarahkan lebih jelas agar kabupaten/kota, kecamatan dan desa-desa beserta penduduk di wilayah pesisir dapat mengejar ketertinggalan dari wilayah lain dari sisi infrastruktur dan berkembangnya perekonomian masyarakatnya.

2. PERMASALAHAN

Kegagalan pembangunan di suatu wilayah umumnya disebabkan oleh dua hal, yaitu (i) pilihan konsep dan strategi pembangunan (ideologi) itu sendiri, termasuk keberpihakan kepada wilayah atau kelompok masyarakat tertentu, dan (ii) karena perencanaan yang kurang baik. Di Indonesia, pada umumnya ketertinggalan pembangunan di wilayah pesisir dan laut lebih banyak disebabkan dua hal di atas sekaligus. Pilihan strategi pembangunan Indonesia yang tidak berpihak dan atau berbasis pada kelautan sebagai penggerak utama pembangunan serta ketidakjelasan perencanaan pembangunan di wilayah pesisir telah mulai dirasakan dampaknya, seperti

(i) penurunan kualitas sumberdaya pesisir dan laut, (ii) kurang berkembangnya kegiatan ekonomi yang berbasis pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan, serta (iii) terjadinya ketergantungan yang semakin besar pada impor bahan pangan pokok, dimana upaya

swasembada pangan terganjal oleh terjadinya konversi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan pemukiman.

Indikator ketidak-berpihakan pilihan strategi pembangunan terhadap wilayah pesisir Lampung dapat dilihat dari rendahnya sumbangan sektor kelautan terhadap PDB/PDRB, yaitu hanya sebesar 6,96 persen yang hanya disumbangkan oleh subsektor perikanan (6,46 persen) dan transportasi laut (0,50 persen) (BPS RI, 2015). Indikator lainnya adalah kerusakan ekosistem pesisir dan laut yang sudah sangat marak terjadi, seperti abrasi, pencemaran, kekumuhan, dan minimnya infrastruktur kecamatan. Ini semua salah satunya disebabkan oleh tidak adanya cetak biru (*blue print*) perencanaan pembangunan khusus wilayah pesisir dan laut yang berupa peta jalan pengembangan wilayah pesisir sehingga lokus dan fokus pembangunan menjadi tidak jelas dan tidak tepat sasaran.

Pembangunan yang tidak terencana, di sisi lain mengakibatkan kondisi wilayah pesisir dan laut umumnya saat ini mengalami gejala penurunan kualitas yang signifikan, sebagaimana juga dialami oleh Provinsi Lampung. Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi yang memiliki potensi kelautan, sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tinggi dan diperkaya dengan keanekaragaman hayati yang cukup besar, namun tingkat pemanfaatan pada umumnya masih belum dilakukan secara optimal, padahal wilayah pesisir Provinsi Lampung mencakup 7 (tujuh) kabupaten/kota yang juga memiliki potensi besar untuk berkembang dalam kerangka pembangunan pesisir dan laut terpadu dan berkelanjutan.

Dalam tataran pembangunan tentunya diperlukan suatu sinergitas dan keterpaduan, karena melibatkan banyak pemangku kepentingan. Keterpaduan ini mutlak harus dilakukan. Keterpaduan dalam hal ini, bukan hanya keterpaduan sektor terkait, juga termasuk di dalamnya adalah keterpaduan konsep “mind set” dan keterpaduan program kegiatan. Pelaksanaan suatu program, didukung oleh program-program lainnya, sehingga proses pelaksanaannya dapat fokus kepada sasaran serta hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan (tepat guna/tepat sasaran).

Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung sudah semestinya memiliki suatu dokumen peta jalan perencanaan dan pengembangan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di wilayahnya, guna memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai perencanaan dan pengembangan yang akan dilaksanakan, komoditi potensial yang akan dikembangkan, daya dukung lingkungan, sarana dan prasarana pendukung, serta hal-hal lain yang terkait.

Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2016 menginisiasi salah satu program pembangunan yang dapat menjadi program unggulan terpadu, yang kemudian disebut dengan jargon GERBANG PELANA (Gerakan Membangun Masyarakat Pesisir Lampung yang Berdaya Guna). Program ini bertujuan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur

dasar, pengembangan perekonomian masyarakat, dan memberdayakan masyarakat di wilayah pesisir, yang mencakup 7 (tujuh) kabupaten/kota pesisir. Program GERBANG PELANA dirancang, direncanakan, dan dilaksanakan secara matang dengan tahapan dan indikator yang jelas dan terukur, sehingga program tersebut diharapkan dapat dipahami dan mudah dilaksanakan oleh pelaksana dan penerima manfaat yaitu aparat pemerintah dan masyarakat.

GERBANG PELANA adalah suatu program percepatan sinergitas pembangunan wilayah pesisir Lampung dan sekitarnya dengan mengoptimalkan segenap potensi SDM, SDA, infrastruktur, kebijakan-kebijakan pusat dan daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dalam rangka ikut mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah pesisir untuk mewujudkan masyarakat pesisir Lampung yang maju dan sejahtera.

3. HASIL DAN ANALISIS

GERBANG PELANA adalah suatu program percepatan sinergitas pembangunan wilayah pesisir Lampung dan sekitarnya dengan mengoptimalkan segenap potensi SDM, SDA, infrastruktur, kebijakan-kebijakan pusat dan daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dalam rangka ikut mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah pesisir untuk mewujudkan masyarakat pesisir Lampung yang maju dan sejahtera. Strategi GERBANG PELANA antara lain:

- (i) Optimalisasi potensi kewilayahan pesisir: pengembangan potensi sesuai dengan tematik SDA pesisir,
- (ii) Keterpaduan, sinergi, harmonisasi antar sektor, stakeholder, ekosistem darat dan laut, wilayah, sains dan manajemen,
- (iii) Inovasi dan hilirisasi SDA dan pengembangan pesisir: mewujudkan adanya daya tambah terhadap SDA, pembangunan kawasan industri dan pariwisata,
- (iv) Konservasi SDA untuk keberlanjutan: pemanfaatan SDA harus mempertimbangkan kesinambungan lingkungan dan masa depan, dan
- (v) Evaluasi dan penetapan indikator capaian: penguatan potensi pesisir dan wilayah sekitarnya.

Secara konseptual, pembangunan di Provinsi Lampung dibagi menjadi 3 (tiga) klaster, yaitu: kawasan pariwisata di bagian barat, kawasan penyangga ketahanan pangan di bagian tengah dan kawasan industri di bagian timur. Luasnya wilayah kajian menyebabkan kedalaman kajian memerlukan pemokus yang lebih proporsional yang didukung oleh fakta dan analisis yang menyeluruh. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemusatan kajian dan lokasi implementasi, sehingga perlu dipilih prioritas daerah yang harus dikaji terlebih dahulu. Pada

kajian pertama ini, wilayah kajian difokuskan pada Teluk Lampung yang meliputi 3 (tiga) kabupaten/kota, yaitu Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Selatan. Ketiga daerah tersebut perlu diprioritaskan agar kompleksitas pembangunan wilayah pesisir yang saat ini ada dapat diurai dan lebih difokuskan sesuai dengan tujuan besar dari Gerakan Membangun Pesisir Lampung Berdaya Guna ini.

Pada kajian Gerakan Membangun Pesisir Lampung Berdayaguna (GERBANG PELANA) ini terdapat 5 (lima) kelompok permasalahan pokok dalam sistem sosial- ekologi (SSE) di Teluk Lampung, yaitu: (1) isu lingkungan dan sumberdaya alam; (2) isu sosial dan kelembagaan; (3) isu strategis ekonomi; (4) isu infrastruktur; dan (5) isu pendidikan. Ada keterkaitan erat antara karakteristik sumberdaya alamnya/kondisi wilayah, karakteristik sosial budaya, dan sumberdaya manusianya (pendidikan) dengan peluang pengembangan ekonominya. Selain itu karakteristik masyarakat dan stratifikasi sosial yang terbentuk juga mempengaruhi permasalahan yang dihadapi oleh wilayah setempat. Isu pengelolaan dan kepemilikan perorangan terhadap pulau-pulau kecil yang ada di sekitar Teluk Lampung berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung pada pendapatan masyarakat, seperti terjadi pengurangan daerah tangkapan ikan dan kurangnya lokasi-lokasi strategis dalam pengembangan wisata berbasis pulau-pulau kecil. Secara garis besar isu dan permasalahan di bawah ini dapat dikelompokkan menjadi wilayah pesisir Teluk Lampung.

Berdasarkan hasil penggalan aspirasi masyarakat dan hasil agregasi potensi, isu dan permasalahan dari data sekunder dan penelitian lapang, maka terungkap beberapa kata kunci yang menjadi dasar pembangunan visi pengelolaan pesisir Lampung. Kata-kata kunci tersebut diantaranya adalah:

- (i) sumberdaya alam dan lingkungan,
- (ii) pesisir Lampung,
- (iii) sumber penghidupan,
- (iv) optimal,
- (v) terpadu,
- (vi) berkelanjutan, dan
- (vii) kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan tujuh kata kunci sesuai dengan harapan masyarakat dan hasil analisis seperti diuraikan di atas, maka Visi Gerakan Membangun Pesisir Lampung Berdaya Guna (Gerbang Pelana) adalah :

”PESISIR LAMPUNG TERBANGUN OPTIMAL, TERPADU DAN BERKELANJUTAN BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”

Upaya untuk mewujudkan Visi Gerakan Membangun Pesisir Lampung Berdaya Guna (Gerbang Pelana) tersebut selanjutnya dapat dicapai melalui misi Gerbang Pelana. Melalui misi ini diharapkan dapat diwujudkan implementasi Gerbang Pelana secara terpadu dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Misi Gerbang Pelana adalah:

- (1) Meningkatkan pengelolaan sumberdaya pesisir Lampung secara terpadu dan berbasis masyarakat.
- (2) Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya dalam pengelolaan pesisir Lampung.
- (3) Memelihara, memperbaiki dan meningkatkan daya dukung serta kualitas lingkungan pesisir Lampung.
- (4) Mendorong akses infrastruktur pemanfaatan sumberdaya pesisir secara optimal, berkelanjutan dan berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mengingat visi merupakan ungkapan keinginan atau harapan atau pandangan masa depan yang ingin dicapai semua pihak yang terkait (*stakeholders*) dari pengelolaan pesisir Lampung yang dinyatakan dalam kalimat yang singkat, maka harapan tersebut perlu dijabarkan secara lebih rinci dalam bentuk tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Tujuan pengelolaan pesisir Lampung secara umum terangkum dalam empat kategori tujuan, yaitu (i) tujuan kelembagaan, (ii) tujuan sosial budaya, (iii) tujuan ekologi dan (iv) tujuan ekonomi.

Strategi pencapaian tujuan pengelolaan pesisir disusun untuk menjalankan visi dan misi yang diharapkan dapat diwujudkan berdasarkan tujuan pengelolaan yang telah dirumuskan sebelumnya. Masing-masing tujuan diharapkan dapat dicapai melalui rumusan strategi yang dibangun. Oleh karena itu, rumusan strategi pada masing-masing tujuan tersebut seoptimal mungkin dibangun untuk mewujudkan tujuan utama pengelolaan pesisir Lampung melalui implementasi Gerbang Pelana ini.

Tabel berikut ini menyajikan rumusan strategi dan program berdasarkan tujuan yang ingin dicapai untuk mewujudkan VISI dan MISI GERBANG PELANA dalam bentuk matriks hubungan antara tujuan, sasaran, strategi dan program implementasi Gerakan Pembangunan Pesisir Lampung Berdaya Guna serta lembaga yang bertanggungjawab.

4. KESIMPULAN

Desain dan indikasi program dalam GERBANG PELANA diarahkan untuk memberikan penguatan upaya untuk menjaga kelestarian ekosistem pada satu sisi dan di sisi lain meningkatkan performa dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Ketergantungan masyarakat pesisir akan sumberdaya wilayah pesisir dan laut menjadi salah satu fokus pemberdayaan masyarakat yang dibangun.

Pendekatan pembangunan ekonomi pada GERBANG PELANA ini juga didesain berbasis pada keberadaan sumberdaya pesisir dan laut. Terdapat tujuh spektrum ekonomi kelautan yang menjadi pilar dan motor penggerak ekonomi wilayah pesisir, yaitu (i) perikanan, (ii) pariwisata bahari, (iii) transportasi laut, (iv) industri kelautan, (v) energi kelautan, (vi) bangunan kelautan, dan (vii) jasa kelautan. Ketujuh spektrum ekonomi kelautan ini didesain dengan model dan pendekatan pembangunan yang HITS - holistik, integratif, tematik dan spasial (ATR, 2016) melalui pola kemitraan publik (pemerintah), swasta (investor) dan rakyat (masyarakat) atau dikenal sebagai P4 (*public, private, people partnership*). Oleh karena itu, sesuai dengan amanat UU Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa, maka diharapkan bahwa pada akhir program Gerbang Pelana, akan banyak muncul secara mandiri dan berkelanjutan BUMDes di wilayah pesisir yang berbasis pada tujuh spektrum ekonomi tersebut, sehingga masyarakat dapat mendapatkan manfaat dari keberadaan sumberdaya pesisir dan laut di sekitarnya secara berkelanjutan.

5. REKOMENDASI

Dengan adanya Roadmap yang tersusun sebagai hasil kajian ilmiah, maka ditindaklanjuti oleh kajian aktual yang menghasilkan rekomendasi yaitu:

- a. Perlu adanya identifikasi locus prioritas berdasarkan Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
- b. Perlu adanya pembinaan kelembagaan untuk mendorong nilai jual wilayah.
- c. Sinergitas, komitmen dan koordinasi semua pihak berdasar kesepakatan.
- d. Pendekatan ekosistem dilanjutkan perbaikan wilayah.
- e. Perlu adanya Tim koordinasi.
- f. Pemberdayaan investor (CSR).
- g. Program kegiatan Gerbang Pelana dimasukkan dalam RKPD SKPD.
- h. Perlu SK penetapan cadangan wilayah kawasan konservasi.
- i. Perlu Pergub untuk mengatur dan menjabarkan tugas penanggungjawab.
- j. Sinkronisasi dengan RTRW dan RZWP3K.
- k. Koordinasi dan sinergitas dengan pemerintah pusat.

Rumusan strategi dan program berdasarkan tujuan yang ingin dicapai untuk mewujudkan VISI dan MISI GERBANG PELANA

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LEMBAGA
TUJUAN KELEMBAGAAN				
Terwujudnya rencana pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir Lampung secara terpadu dan berbasis masyarakat.	1. Tersusunnya rencana pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir Lampung secara terpadu dan berbasis masyarakat	1.1. Menyusun rencana pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir Lampung secara terpadu dan berbasis masyarakat	1.1.1. Penyusunan dan pemantapan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berbasis masyarakat dan disepakati dan dipatuhi segenap stakeholder pesisir.	Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kanwil BPN Prov. Lampung
			Perumusan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengintegrasikan Rencana Zonasi WP3K dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daratan	Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kanwil BPN Prov. Lampung
			Pembuatan Rencana Zonasi Kawasan yang disesuaikan dengan peruntukan dan mengakomodir berbagai kegiatan pembangunan serta kepentingan ekonomi, sosial dan ekologi	Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kanwil BPN Prov. Lampung
			Penyusunan rencana tata ruang secara lebih rinci (<i>site plan</i>) untuk berbagai kegiatan pembangunan yang potensial untuk dikembangkan	Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kanwil BPN Prov. Lampung

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LEMBAGA
	2. Berkurangnya konflik diantara pemilik, pengguna dan pengelola sumberdaya pesisir;	2.1. Melibatkan semua stakeholder dalam pengelolaan sumberdaya pesisir	2.1.1. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, masyarakat dan stakeholder lainnya dalam perencanaan, implementasi dan pemantauan sumberdaya pesisir	Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan, Swasta dan Masyarakat
	3. Tersedianya data dan informasi yang relevan untuk kepentingan pengelolaan pesisir secara terpadu;	3.1. Menyusun data dan informasi yang relevan untuk kepentingan pengelolaan sumberdaya pesisir secara terpadu	3.1.1. Penyusunan berbagai kajian dan penelitian untuk mendukung implementasi pengelolaan pesisir secara terpadu	Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan, Balitbangda, dan Perguruan Tinggi
	4. Tersedianya hukum dan kelembagaan dalam pengelolaan pesisir secara terpadu	4.1. Mengembangkan hukum dan kelembagaan secara terpadu	4.1.1. Pengembangan kelembagaan yang menunjang berbagai kegiatan ekonomi di wilayah pesisir	Bappeda, Balitbangda, Biro Hukum, Perguruan Tinggi
			4.1.2. Penyiapan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan yang mendukung pengelolaan kawasan pesisir di Lampung	Bappeda, Balitbangda, Biro Hukum, Perguruan Tinggi
			4.1.2. Pengembangan sistem dan mekanisme yang kondusif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat berdasarkan "win-win solution"	Bappeda, Swasta, Masyarakat, Balitbangda, dan Perguruan Tinggi
			4.1.3. Pembangunan sistem dan mekanisme yang mendukung penegakan hukum secara adil dan tidak memihak	Bappeda dan Balitbangda, Perguruan Tinggi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LEMBAGA
TUJUAN SOSIAL BUDAYA				
Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya dalam pengelolaan pesisir Lampung	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholders) <i>lainnya</i> dalam pengelolaan pesisir Lampung;	1.1. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholders) <i>lainnya</i> dalam pengelolaan pesisir Lampung;	1.1.1. Pembangunan sistem dan mekanisme pelibatan stakeholder dari proses perencanaan sampai proses implementasi pengelolaan sumberdaya pesisir Lampung	Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PMD dan Balitbangda, Perguruan Tinggi
			1.1.2. Peningkatan peran serta stakeholder dalam pengawasan langsung pelaksanaan pengembangan kawasan pesisir Lampung	Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Balitbangda, Perguruan Tinggi
	2. Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan masyarakat pesisir dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir;	2.1. Mengembangkan sumberdaya manusia	2.1.1. Pengembangan dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang terkait dengan pengembangan kawasan pesisir Lampung	Bappeda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Balitbangda, Perguruan Tinggi
			2.1.2. Pengembangan muatan lokal yang terkait dengan pengembangan kawasan pesisir Lampung	Bappeda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Balitbangda, Perguruan Tinggi
			Pembangunan sistem pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pengembangan kawasan pesisir	Bappeda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Balitbangda, Perguruan Tinggi

	3. Terbukanya kesadaran setiap <i>stakeholder</i> bahwa sumberdaya alam pesisir dan lingkungannya mempunyai nilai ekonomis sangat tinggi;	3.1. Meningkatkan kesadaran stakeholder bahwa sumberdaya yang terdapat di kawasan pesisir memiliki nilai jual yang meningkatkan kesejahteraannya	3.1.1. Penyuluhan dan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat dan seluruh stakeholder pesisir tentang tingginya nilai jual sumberdaya yang terdapat di kawasan pesisir mereka dan dapat meningkatkan kesejahteraannya	Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PMD, Balitbangda, dan Perguruan Tinggi
TUJUAN EKOLOGI				
Memelihara, memperbaiki dan meningkatkan daya dukung dan kualitas lingkungan pesisir Lampung	1. Terjaganya kualitas lingkungan pesisir Lampung;	1.1. Memelihara, memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan pesisir Lampung;	1.1.1. Identifikasi dan inventarisasi kondisi sumberdaya alam dan kualitas lingkungan pesisir Lampung untuk menentukan status perlakuan yang perlu diberikan terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan pesisir tersebut	Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pariwisata
			1.1.2. Rehabilitasi kawasan konservasi, pengawasan dan peningkatan kualitas lingkungan pesisir Lampung	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, BKSDA dan Balitbangda, Perguruan Tinggi
			1.1.3. Rehabilitasi dan penanggulangan degradasi lingkungan pesisir Lampung	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, BKSDA dan Balitbangda, Perguruan Tinggi
			1.1.4. Rehabilitasi dan penanggulangan abrasi, sedimentasi dan pencemaran lingkungan pesisir	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, BKSDA dan Balitbangda, Perguruan Tinggi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LEMBAGA
			1.1.5. Penetapan hukum dan aturan yang jelas dan tegas bagi perlindungan sumberdaya alam pesisir Teluk Lampung	Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Biro Hukum, BKSDA dan Balitbangda, PTinggi
	2. Terwujudnya konservasi terhadap keanekaragaman hayati (jenis, habitat dan ekosistem) yang terintegrasi dan berkesinambungan antara lahan (<i>up land</i>) atas daerah bawah (<i>low land</i>);	2.1. Mewujudkan kawasan konservasi terhadap keanekaragaman hayati (jenis, habitat dan ekosistem) yang terintegrasi dan berkesinambungan antara lahan atas (<i>up land</i>) atas daerah bawah (<i>low land</i>);	2.1.1. Identifikasi, inventarisasi dan pengkajian kawasan hulu yang mempunyai keanekaragaman hayati (jenis, habitat dan ekosistem) tinggi yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap kegiatan pembangunan wilayah pesisir untuk direkomendasikan sebagai kawasan konservasi	Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, BKSDA dan Balitbangda, Perguruan Tinggi
	3. Tumbuhnya kesadaran setiap <i>stakeholder</i> untuk memelihara dan merehabilitasi lingkungan pesisir;	3.1. Menumbuhkan kesadaran setiap <i>stakeholder</i> untuk memelihara dan merehabilitasi lingkungan pesisir;	3.1.1. Penyuluhan dan pelatihan terhadap semua stakeholder mengenai pentingnya memelihara dan merabilitasi lingkungan pesisir	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, BKSDA dan Balitbangda, Perguruan Tinggi
			3.1.2. Pemberian <i>reward</i> /penghargaan terhadap setiap individu atau kelompok yang telah berjasa dalam melestarikan dan merehabilitasi lingkungan pesisir	Bappeda dan Dinas Lingkungan Hidup
			3.1.3. Penumbuhan kesadaran sejak usia dini untuk memelihara dan merehabilitasi lingkungan pesisir;	Dinas Lingkungan Hidup dan Masyarakat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LEMBAGA
TUJUAN EKONOMI				
Mendorong akses infrastruktur pemanfaatan sumberdaya pesisir secara optimal, berkelanjutan dan berkeadilan untuk mewujudkan kawasan Teluk Lampung sebagai kawasan wisata terpadu guna mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.	1. Berkembangnya industri pariwisata yang berwawasan lingkungan dan sesuai dengan sosial dan budaya setempat;	1.1. Mengembangkan industri pariwisata yang berwawasan lingkungan dan sesuai dengan sosial dan budaya setempat;	1.1.1. Penyusunan berbagai kajian dan penelitian untuk mendukung implementasi kawasan Lampung sebagai kawasan wisata terpadu [kajian daya dukung, daya tampung dan kesesuaian]	Bappeda, Balitbangda dan Dinas Pariwisata
			1.1.2. Inventarisasi berbagai potensi dan daya tarik wisata yang dapat dikembangkan secara terpadu	Bappeda dan Dinas Pariwisata
			1.1.3. Pembuatan <i>master plan</i> untuk pengembangan kawasan Lampung sebagai kawasan wisata terpadu	Bappeda, Dinas PU dan Penataan Ruang dan Dinas Pariwisata
			1.1.4. Pembangunan berbagai prasarana dan sarana yang mendukung pengembangan kawasan wisata terpadu	Bappeda Dinas PU dan Penataan Ruang dan Dinas Pariwisata
			1.1.5. Program studi banding ke beberapa lokasi pengembangan wisata terpadu, baik dalam maupun luar negeri	Bappeda dan Dinas Pariwisata
			1.1.6. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, masyarakat dan stakeholder lainnya dalam pengembangan kawasan Lampung sebagai kawasan wisata terpadu	Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas PMD dan Dinas Lingkungan Hidup
			1.1.7. Pengembangan paket-paket wisata terpadu	Dinas Pariwisata

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LEMBAGA
			1.1.8 Memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada nelayan untuk menjadi <i>tour gate</i> yang baik	Dinas Pariwisata dan Dinas Kelautan dan Perikanan
			1.1.9. Sosialisasi kepada pelaku usaha wisata bagaimana menjalankan wisata yang ramah lingkungan. [misal; menjaga kebersihan, tidak menginjak terumbu karang, dll	Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Lingkungan Hidup
	2. Berkembangnya kegiatan perikanan dengan tetap mempertahankannya keberlanjutannya;	2.1. Mengembangkan kegiatan perikanan dengan tetap mempertahankannya keberlanjutannya;	2.1.1. Penyusunan berbagai kajian dan penelitian dalam mengembangkan kegiatan perikanan untuk mendukung implementasi kawasan Lampung sebagai kawasan wisata terpadu	Bappeda, Balitbangda dan Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.1.2. Inventarisasi berbagai potensi perikanan yang dapat dikembangkan secara terpadu dan berkelanjutan	Bappeda, Balitbangda dan Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.1.3. Pembuatan <i>master plan</i> pengembangan perikanan yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan Lampung sebagai kawasan wisata terpadu	Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata dan Dinas PU dan Penataan Ruang
			2.1.4. Pembangunan berbagai prasarana dan sarana yang mendukung pengembangan kegiatan perikanan	Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas PU dan Penataan Ruang

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LEMBAGA
			2.1.5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, masyarakat dan stakeholder lainnya dalam pengembangan kegiatan perikanan yang terintegrasi dengan kegiatan pariwisata	Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata Dinas Penanaman Modal dan PTSP, dan Masyarakat
			2.1.6. Pengembangan budidaya perikanan berbasis pendekatan “sea farming”	Bappeda, Balitbangda, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata dan Masyarakat
		2.2. Mengembangkan produk bernilai tambah (<i>added value</i>) untuk hasil perairan	2.2.1 Memberi pelatihan terkait pengolahan rumput laut menjadi semi karagenen (<i>Chip</i>)	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PMD, dan Balitbangda
			2.2.2 Memberikan pelatihan pengolahan surimi daging ikan untuk bahan setengah jadi sebagai bahan baku ekspor	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PMD, Bappeda dan Balitbangda
			2.2.3 Memberikan pelatihan terkait pengemasan produk hasil perikanan dan peningkatan kualitas sanitasi dan heygin untuk pengolahan hasil perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perdagangan, Dinas PMD, Bappeda, dan Balitbangda
			2.2.4 Mengembangkan BUMDes Pesisir	Dinas PMD, Dinas Koperasi UKM, Biro Perekonomian, Balitbangda, Bappeda

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LEMBAGA
		2.3. Ekstensifikasi budidaya	2.3.1 Kajian potensi detail budidaya perikanan di Teluk Lampung	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PMD, Bappeda dan Balitbangda
			2.3.2 Penataan detail budidaya perikanan di Teluk Lampung	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PMD, Bappeda dan Balitbangda
			2.3.3 Revitalisasi budidaya perikanan di Teluk Lampung	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PMD, Bappeda dan Balitbangda
		2.4 Intensifikasi budidaya	2.3.1 Perbaiki tambak, saluran dan areal budidaya perikanan di Teluk Lampung	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PMD, Bappeda dan Balitbangda
			2.3.2 Kaji tindak perbaikan sistem perbenihan udang dan ikan	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PMD, Bappeda dan Balitbangda
			2.3.3 Kaji tindak pengembangan teknologi budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PMD, Bappeda dan Balitbangda
			2.3.4 Pengembangan kemampuan SDM	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PMD, Bappeda dan Balitbangda
		2.5 Diversifikasi sistem produksi	2.5.1 Pengembangan sistem akuakultur	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PMD, Bappeda dan Balitbangda

			2.5.2 Pengembangan komoditas	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PMD, Bappeda dan Balitbangda
			2.5.3 Pengembangan pembenihan ikan onshore dan offshore	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PMD, Bappeda dan Balitbangda
			2.5.4 Pengembangan pendederan	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PMD, Bappeda dan Balitbangda
		2.6 Mengatur kegiatan penangkapan ikan	2.6.1 Pengaturan penggunaan alat tangkap : (i) Pembatasan alat tangkap udang, (ii) Pengalihan, (iii) Waktu penangkapan	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PMD, Bappeda dan Balitbangda
		2.7 Mengintegrasikan kegiatan budidaya dan penangkapan ikan : pengembangan sea farming	2.7.1 Penyiapan masyarakat	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PMD, Bappeda dan Balitbangda
			2.7.2 Penyiapan ekosistem	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PMD, Bappeda dan Balitbangda
			2.7.3 Penyiapan stok benih	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PMD, Bappeda dan Balitbangda
		2.8 Mengkonservasi dan merehabilitasi habitat SDI	2.8.1 Pengawasan kegiatan penangkapan yang tidak ramah lingkungan	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PMD, Bappeda dan Balitbangda
		2.9 Memperkaya stok SDI	2.9.1 Penambahan stok SDI kembali (<i>Restocking</i>)	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PMD, Bappeda dan Balitbangda

			2.9.2 Pengkayaan Stok SDI (<i>Stock enhancement</i>)	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PMD, Bappeda dan Balitbangda
			2.9.3 Pelebagaan kelompok nelayan dalam rangka memperkaya stok SDI	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PMD, Bappeda dan Balitbangda
		2.10 Meningkatkan kualitas produksi perikanan tangkap	2.10.1 Peningkatan fasilitas penanganan pasca panen ikan/udang	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PMD, Bappeda dan Balitbangda
		2.11 Mendorong percepatan pendapatan nelayan	2.11.1 Pengembangan mata pencaharian alternatif	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PMD, Bappeda dan Balitbangda
			2.11.2 Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PMD, Bappeda dan Balitbangda
	3. Berkembangnya berbagai kegiatan lainnya seperti pertanian, industri, perhubungan dan perdagangan untuk menunjang dan mewujudkan pengembangan pariwisata terpadu;	3.1. Mengembangkan berbagai kegiatan lainnya seperti pertanian, industri, perhubungan dan perdagangan untuk menunjang dan mewujudkan pengembangan pariwisata terpadu;	3.1.1. Penyusunan berbagai kajian dan penelitian dalam mengembangkan berbagai kegiatan lainnya seperti pertanian, industri, perhubungan dan perdagangan untuk menunjang dan mewujudkan pengembangan pariwisata terpadu;	Bappeda dan Balitbangda
			3.1.2. Inventarisasi berbagai kawasan yang mempunyai potensi berbagai kegiatan lainnya seperti pertanian, industri, perhubungan dan perdagangan untuk menunjang dan mewujudkan pengembangan pariwisata terpadu	Bappeda dan Balitbangda

			3.1.3. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, masyarakat dan stakeholder lainnya dalam pengembangan berbagai kegiatan lainnya seperti pertanian, industri, perhubungan dan perdagangan untuk menunjang dan mewujudkan pengembangan pariwisata terpadu;	Bappeda
	4. Meningkatnya motivasi, kesadaran dan keinginan Pemerintah Daerah, Swasta dan masyarakat setempat dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pesisir secara berkelanjutan untuk kegiatan pariwisata terpadu;	4.1. Meningkatkan motivasi, kesadaran dan keinginan Pemerintah Daerah, Swasta dan masyarakat setempat dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pesisir secara berkelanjutan untuk kegiatan pariwisata terpadu;	4.1.1. Inventarisasi berbagai potensi investor yang berminat melakukan penanaman modal dalam pengembangan wisata	Bappeda dan Dinas Pariwisata
			4.1.2. Penciptaan iklim usaha yang kondusif dan adanya jaminan keamanan dari pemerintah dan masyarakat	Dinas Pariwisata, TNI dan POLRI
			4.1.3. Pengembangan sistem kemitraan antara investor dengan masyarakat setempat	Bappeda, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas PMD
			4.1.4. Penyediaan pusat informasi dan pemasaran wisata	Bappeda dan Dinas Pariwisata
			4.1.5. Pengembangan sistem intensif dan disintensif untuk menarik minat para investor dalam menanamkan modalnya	Bappeda, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas PMD
			4.1.6. Penggalian berbagai sumber pendanaan lainnya untuk menunjang pelaksanaan berbagai program pengembangan kawasan pesisir Lampung	Bappeda, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas PMD

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LEMBAGA
	5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kawasan yang didukung kemudahan/akses infrastruktur.	5.1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan pesisir Lampung	5.1.1. Pengembangan ekonomi kawasan berbasis sumberdaya lokal	Bappeda
			5.1.2. Peningkatan produktivitas pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut secara optimal	Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas TPH, Dishub, dan Dinas Perindustrian
			5.1.3. Peningkatan promosi investasi kawasan pesisir Lampung	Bappeda, Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			5.1.4. Mengembangkan aksesibilitas dan konektivitas melalui jalur laut atau sungai	Dinas Perhubungan dan Dinas PU dan Penataan Ruang
			5.1.5. Melakukan kajian kelayakan water front city di Teluk Lampung	Balitbangda dan Bappeda
	6. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang didukung infrastruktur dasar.	6.1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir Lampung.	6.1.1. Pengembangan <i>alternative income</i> disesuaikan dengan karakteristik SDM Teluk Lampung	Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan
			6.1.2. Pengembangan sistem pemasaran produk yang dihasilkan oleh masyarakat secara terintegrasi	Bappeda, Dinas Perdagangan, Biro Perekonomian
			6.1.3. Pengembangan lapangan pekerjaan yang berorientasi pada penyerapan tenaga kerja lokal	Bappeda, Dinas Naker dan Trans
			6.1.4. Penyediaan/pengembangan infrastruktur dasar	Dinas PU dan Penataan Ruang, Bappeda

GERBANG PELANA SEBAGAI INSTRUMEN MEMBANGUN PESISIR LAMPUNG

